

PEMBENTUKAN SISTEM KETAHANAN SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Agus Razikin

Politeknik Pratama Mulia Surakarta

ABSTRACT

This research was based on the researcher's concern about the social conflict that in many times caused mass riot especially those that happened in Surakarta. It was noted down, that in the last decade there were 11 mass riots that caused many victims, materialy and psychologically. This problem even became the main city issue that caused mass disturbance. The early stage of this research aimed to formulate a social defence model in the community by doing Focus Discussion Group. The supporting data of this research were taken from home stakeholders in Surakarta, such as professional organizations, local association and local government. The data are taken in the form of facts and other things that have something to do with the actual condition in the daily life. Therefore, this research tends to be an explorative research. A harmony concept would be used in explaining the social defence. That stress not only on many indicators in the social harmony but also the social relationship among the different social level. These are due to the community need of social harmony to realize safely and comfortably situation in community. Therefore a harmony relationship in forming social defence system will be appeared. In accordance with the formation of a safe and comfortabe city environment, there are several conditions of social defence that could be identified by the ability of keeping peace, anticipating conflict and recovering social condition. Based on the research, the social defence values could be produced by planning development in every district, through the ability of the community to identify the rising issues and through the social defence potencies as logical frames. Later on the researcher strengthened the social defence by forming an appropriate organization which concerns on researching the community management and social defence by forming of social defence.

Keywords : Social Defence, Peace Keeping, Conflict Anticipation, Social Recovery, Division of Social Defence.

A. PENDAHULUAN

Menurut hasil penelitian, dalam dasawarsa terakhir ini di Surakarta

sudah terjadi kurang lebih 11 kali kerusuhan massal yang mengakibatkan banyak korban jiwa, kerugian material dan psikologis bagi para korbannya. Bahkan hal ini pun telah menjadi isu kota dan meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Sejarah menunjukkan bahwa gerakan-gerakan radikal sejak dulu sudah eksis. Gerakan politik di Surakarta tidak hanya menjadi keseharian kaum-elit kota, masyarakat pedesaan turut menyambut baik ajakan kaum elit kota karena kondisi yang menekan. Berpolitik pun menjadi keseharian orang Surakarta.

Berbagai konflik yang terjadi kurang lebih sebanyak 11 kali di latar belakang oleh berbagai latar belakang pemicu konflik.

Tabel 1. Isu Konflik di Surakarta

Tahun	Uraian	Isu Pemicu
1911	Konflik Kong Sing Cina dengan Kong Sing Jawa	Persaingan dagang, ras
1918 – 1923	Gerakan-gerakan radikal	Penolakan Guibernemen membatasi luas tanah yang ditanami tebu, menentang feodalisme dan kapitalisme komunisme
1923, Mei & Oktober	Pemogokan dan kerusuhan buruh kereta api	Menentang kapitalisme, komunisme
1946 – 1950	Pergolakan anti prasaja	Pro-kontra feodalisme
1946	Api PON	Politik, komunisme
1947	Pertempuran Srambatan	Politik, komunisme
1948	Kerusuhan akibat affair Madura	Politik, komunisme
1949	Serangan Umum	Politik
1966	Kerusuhan anti Cina, pembakaran gudang sembako di Pasar Legi, Tambah, Segaran	Pemukulan Cina terhadap pemuda Indonesia
1980	Kerusuhan anti Cina	Pemuda Cina menyerempet pemuda Indonesia

Lanjutan Tabel 1.

Tahun	Uraian	Isu Pemicu
1998	Penjarahan dan kekerasan sosial	Kesenjangan sosial, kerusuhan anti Cina, kerusuhan anti kemapanan, kerusuhan anti pemerintah.

Sumber : Adriani Sumampouw & Darmanto Jatman, 1998 : 27

Konflik dan integrasi dalam masyarakat Surakarta tampak memiliki persamaan-persamaan yang khas. Pertama, adanya "*Power Struggle*" (perebutan kekuasaan). Kedua, karena adanya "*Value Struggle*" (perbenturan nilai) dalam upaya perebutan pengaruh dan hegemoni baik sosial, politik, ekonomui maupun budaya dan agama. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem ketahanan sosial dalam penciptaan iklim kota yang aman dan nyaman masih lemah dan sering cenderung memunculkan sikap yang destruktif dan tidak akomodatif merespon kejadian-kejadian serta aspirasi-aspirasi yang ada.

Merujuk pada hal tersebut di atas maka diperlukan perspektif paradigma baru dalam pembangunan masyarakat Surakarta, yaitu berpijak pada suatu kerangka budaya yang otentik dan positif mendukung kemajuan, kemandirian partisipasi masyarakat dan keadilan sosial. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*, akan menumbuhkan percaya diri dari masyarakat yang pada gilirannya partisipasi masyarakat akan tumbuh secara wajar.

Perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat seperti disebut di atas mutlak diperlukan, terlebih-lebih pada era otonomi daerah sekarang ini. Otonomi daerah mengamanatkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. Manakala pembangunan tidak dilakukan bersama masyarakat, maka potensi kegagalan akan semakin besar dan mungkin sekali dapat menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial seperti yang sering terjadi di masa lalu. Oleh karenanya kemitraan antara institusi pemerintah, di mana dalam hal ini adalah pemerintah kelurahan dan lembaga lainnya yang ada

di dalamnya mutlak diperlukan guna membangun pola membangun yang me-masyarakat, dalam rangka menyikapi kegagalan-kegagalan model pembangunan top-down yang dilakukan oleh pemerintah orde baru lalu.

Seiring dengan arah reformasi yang mana menuntut peningkatan kualitas pelayanan pemerintah teriring dengan adanya penerapan otonomi daerah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan selayaknya dapat memenuhi 10 prinsip *Good Government* yaitu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif (tanggap), kesetaraan, berwawasan strategis, akuntabilitas, pengawasan, efektif dan efisien, serta profesionalisme. Apabila kita lihat lebih lanjut, dalam proses pembangunan sebenarnya diperlukan suatu sinergi untuk menjamin kenyamanan hidup. Ironisnya, sikap masyarakat sebagian besar cenderung pasif dalam menerima pelayanan yang “memberatkan” masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme kerja sinergi antara aparatur, masyarakat dan asosiasi-asosiasi masyarakat untuk terpenuhinya suatu kepuasan kebutuhan bersama mengingat bahwa ada keterkaitan (*linkages*) antara asosiasi-asosiasi lokal dengan pemerintah daerah yang merupakan dimensi yang sangat penting dalam mengembangkan otonomi daerah. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pasal 92 (1) disebutkan bahwa : “Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta”. Ditambahkan pula dalam ayat (2) : “Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota”. Di sini telah jelas disebutkan adanya suatu pemberdayaan dari masyarakat yang diartikan sebagai suatu penggalian potensi berupa masukan, pendapat tentang keinginan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk pembangunan.

Arah pembangunan yang partisipatif selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir berbagai konflik, terlebih konflik yang berujung pada kerusuhan, sehingga apa yang menjadi harapan akan terciptanya keadaan yang nyaman bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya ketahanan sosial.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk membentuk model ketahanan sosial berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus mengidentifikasi profile stakeholders yang ada di Surakarta, serta mengkaji potensi / kapasitas kualitas pelayanan Pemerintah Kelurahan di surakarta.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diawali dengan penelitian eksploratif untuk mendapatkan baseline data ketahanan sosial. Pada tahap eksplorasi, akan dilakukan eksplorasi secara luas dengan menjangkau stakeholders dalam masyarakat, seperti organisasi profesi, pemerintah daerah (kelurahan, kota) dan asosiasi lokal. Selanjutnya model-model yang ada dievaluasi untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model hubungan yang terjadi dengan analisis SWOT. Hasil yang didapat ini akan dibawa ke dalam Focus Discussion Group sebagai kerangka awal model yang akan didiskusikan bersama pihak-pihak terkait. Selanjutnya dilakukan uji coba model melalui penelitian aksi di lokasi penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melalui proses tahapan teknis kegiatan atau prosedur sebagai berikut :

- a. Melakukan eksplorasi terhadap partisipasi masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan oleh asosiasi lokal dan pelayanan oleh pemerintah kelurahan dalam rangka membentuk suatu sistem ketahanan sosial.
- b. Melakukan Focus Group Discussion di tingkat kelurahan. Hasil yang diharapkan adalah adanya model yang sudah disistematisasikan oleh tim peneliti.

- c. Menetapkan model. Hasil yang diharapkan adalah terkelolanya ketahanan sosial sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.
- d. Uji coba model. Hasil yang diharapkan adalah terujinya model pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada ketahanan sosial.
- e. Evaluasi. Hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah adanya evaluasi tentang penerapan model tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data kualitatif maupun Focus Discussion Group dilakukan secara deskriptif yang sistematis (systemic approach, Smith, 1978). Untuk kegiatan pada action research akan dilakukan bersama-sama dengan partisipan kegiatan dan bersatu dengan pengumpulan data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Surakarta dengan 5 kelurahan sebagai *Pilot Project*.

5. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah pemerintah kota Surakarta (dalam hal ini khususnya Bappeda, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan), asosiasi lokal (karang taruna, kelompok pengajian, PKK, LPMK, dll) serta stakeholder masyarakat (pengusaha dan kelompok profesional lainnya).

6. Target Penelitian

Target yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

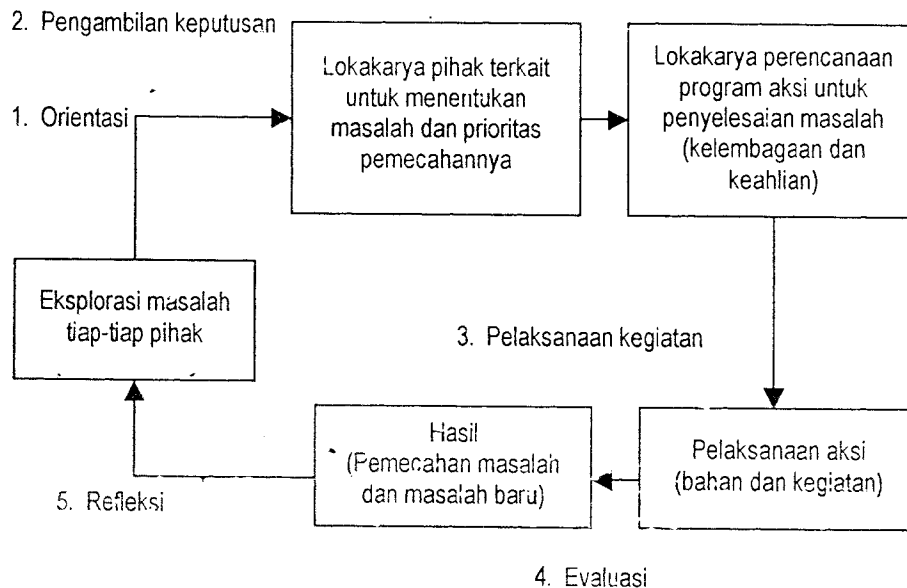
- a. Diperolehnya sebuah sistem ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan pada kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing komponen.
- b. Sistem tersebut diharapkan dapat digunakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 di mana ada pesan serta

masyarakat / stakeholders dan asosiasi-asosiasi lokal di dalamnya.

7. Pendekatan Umum

Pendekatan umum yang dilakukan dalam pengamatan ketahanan sosial masyarakat pada saat penelitian ini melalui riset aksi dan penyelenggaraan Focus Discussion Group (FDG). Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai ketahanan sosial tersebut telah meresap dalam masyarakat.

Bagan 1. Bagan Alur Penelitian Aksi



8. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mengkaji sistem ketahanan sosial ini ada 3 tahapan umum yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Identifikasi indikasi-indikasi ketahanan sosial yang dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan Focus Discussion Group (FDG).
- b. Pengukuran nilai-nilai ketahanan sosial melalui penyebaran angket, wawancara serta pengamatan proses dan mekanisme musyawarah pembangunan.
- c. Kompleksi data lapangan dan sinkronisasi hasil kajian dengan studi literatur untuk mengkerangkakan model ketahanan sosial yang ada serta rekomendasi terhadap model tersebut untuk waktu yang akan datang.

C. PEMBAHASAN

Kota-kota dibangun untuk wilayah kehidupan warganya. Pembangunan ini diarahkan untuk membuat kota menjadi wilayah kehidupan yang nyaman dan aman. Dalam kualitas seperti itu, maka kota harus memenuhi syarat-syarat : (1) nyaman ditinggali, (2) tidak ada rasa takut, (3) identitas dan kontrol semua warga terhadap pembangunan kota, (4) adanya akses terhadap imajinasi dan kegembiraan, (6) tersedia ruang publik dan komunitas, (7) keadilan, (8) serta kemandirian kota.

Sejalan dengan penciptaan lingkungan kota yang aman dan nyaman, berbagai prasyarat tersebut mengindikasikan adanya ketahanan sosial yang ada, yaitu seperti kemampuan *peace keeping*, *antisipasi konflik*, *resolusi konflik* serta *social recovery*.

Hasil penelitian dari Community Development Strategy (CDS) tahun 2002 mengenai kondisi umum sosial perkotaan, diperoleh kesimpulan bahwa Kota Surakarta dapat dikatakan sebagai kota yang rentan terhadap konflik. Menyikapi kondisi ini, kajian mengenai ketahanan sosial ini menarik untuk dilakukan dan mengupayakan pengembangan model untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Surakarta.

a. Kemampuan *Peace Keeping*

Kemampuan masyarakat dalam melakukan *peace keeping* dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam menyediakan kota yang nyaman untuk ditinggali, tidak ada rasa takut, identitas dan kontrol semua anggota masyarakat terhadap kontrol pembangunan kota, adanya akses terhadap imajinasi dan kegembiraan, dan tersedianya ruang publik dan komunitas.

Hasil kajian dan analisis terhadap kemampuan *peace keeping* masyarakat Surakarta melalui pengamatan dan wawancara selama kegiatan Focus Discussion Group berlangsung secara umum nampak sebagai berikut :

Tabel 2. Kemampuan Melakukan Peace Keeping

No.	Indikator	Permasalahan	Hasil Kajian Analisis
1.	Kota nyaman untuk ditinggali	<ul style="list-style-type: none"> - PKL - Pekat (judi, miras, narkoba) - Kebersihan lingkungan 	<p>Permasalahan ini mengganggu kenyamanan kota sehingga muncul usulan untuk melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban PKL. - Penyuluhan, penindakan dan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pekat / pengendara sepeda motor. - Penambahan insentif petugas sampah dan sarana prasarana kebersihan.

Lanjutan Tabel 2

No.	Indikator	Permasalahan	Hasil Kajian Analisis
2.	Tidak ada rasa takut	Sindrom anarkhisme dan kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.	Terutama menghadapi situasi (politik) pemilu mendatang diusulkan berbagai forum / gerakan kampanye pemilu damai, sarasehan antar parpol, rencana pembentukan kelompok sadar kamtibmas oleh kepolisian mulai tingkat RT s/d kota.
3.	Identitas dan kontrol masyarakat terhadap pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pelayanan publik oleh pemerintah kelurahan yang masih lambat. - Biaya yang mahal - Minimalnya sarana dan prasarana pendidikan 	Masyarakat mulai menilai berbagai kualitas saran dan prasarana kehidupan kota baik dari sisi manajerial maupun fisik.
4.	Adanya akses terhadap imaginasi dan kegembiraan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sarana dan prasarana untuk mengembangkan kesenian. - Perlunya sarana dan prasarana hiburan (gedung film, taman hiburan, dll) 	Masyarakat memerlukan ruang-ruang untuk mengekspresikan diri dalam seni dan hiburan. Kebutuhan ini dinilai penting sehingga muncul dalam forum musyawarah pembangunan agar direalisasikan
5.	Terseidanya ruang publik dan komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sarana dan prasarana publik yang aksesibel. - Perlunya ruang publik di kota (taman kota, alun-alun, dll). 	Bagi kenyamanan kota secara bersama masyarakat mulai memperhitungkan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel. Ruang publik diperlukan masyarakat secara mudah dan murah sehingga masyarakat merasa memiliki fasilitas kota secara bersama-sama.

Sumber : Data Primer

b. Kemampuan Menghadapi Konflik

Indikator kemampuan menghadapi konflik ini menjadi salah satu indikator ketahanan sosial dengan pertimbangan bahwa kondisi ketahanan sosial yang ada di masyarakat kota teruji manakala terjadi ketegangan ataupun konflik. Dalam kondisi yang relatif aman, indikasi ini kurang begitu terlihat. Sehingga peneliti berusaha memunculkan topik-topik yang menonjolkan isu kerawanan (sosial, politik maupun SARA) ke dalam forum musyawarah yang berlangsung. Kemungkinan-kemungkinan permasalahan ataupun kondisi masyarakat / kota yang dapat memicu terjadinya konflik dapat menjadi isu sentral untuk memancing sejauh mana masyarakat peduli terhadap kemungkinan berkembangnya permasalahan menjadi konflik sehingga dapat diketahui pemikiran / strategi yang mereka munculkan menyikapi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, minimal dalam penelitian ini masing-masing sub indikator yang ada terkait dengan kemampuan menghadapi konflik terbaca dari respon masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan tersebut. Secara ringkas hasilnya nampak sebagai berikut :

Tabel 3. Kemampuan Menghadapi Konflik

No.	Indikator	Permasalahan	Hasil Kajian Analisis
1.	Kemampuan memetakan kemungkinan pemicu konflik	Maraknya pekat Krisis ekonomi Kesenjangan ekonomi Diskriminasi menyangkut SARA	Dalam forum musyawarah pembangunan, masyarakat telah diajak untuk bersama-sama memetakan berbagai permasalahan yang jika tidak disikapi dengan bijak dapat menjadi pemicu konflik.

Lanjutan Tabel 2

No.	indikator	Permasalahan	Hasil Kajian Analisis
2.	Kemampuan memetakan saluran-saluran yang mampu meredam konflik	Lembaga agama Parpol Aparat Penegak Hukum Karang Taruna Indonesia PKK, LSM, Ormas, dll	Dalam forum musyawarah pembangunan pelibatan berbagai unsur masyarakat membuat saling mengenal komponen-komponen / institusi sosial yang mereka miliki.
3.	Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi kerusuhan massal	Aksi pembakaran dan perusakan gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum lainnya	Ditemuinya berbagai slogan perdamaian baik melalui media massa, elektronik, spanduk, baliho, dll. Dalam forum musyawarah pembangunan masyarakat nampak mengedepankan kemajuan / kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kenyamanan kehidupan kota secara keseluruhan
4.	Kemampuan menyediakan sarana / wadah / forum yang berperan meredam / mengatasi konflik	Lembaga agama Parpol Aparat penegak Hukum Karang Taruna Indonesia PKK, LSM Ormas, dll	Masyarakat menilai keberadaan komponen-komponen tersebut agar lebih sinergis dengan masyarakat sehingga fungsi meredam / mengatasi konflik secara bersama-sama sesuai kapasitas masing-masing.
5.	Kemampuan untuk mengembangkan sarana penyaluran crisis center sehingga tidak terjadi kerusuhan massal	Kebudayaan akan adanya forum sarasehan antar parpol, agama, etnis, dll.	Keberadaan forum musyawarah pembangunan minimal telah menunjukkan pentingnya ruang-ruang komunikasi secara bersama di antara berbagai elemen kota.

Sumber : Data Primer

c. Kemampuan Resolusi Konflik

Kemampuan resolusi konflik yang diharapkan adalah memetakan model-model dan mekanisme yang muncul di masyarakat ketika terjadi konflik. Meskipun terjadi berbagai tindak kerusuhan dan anarkhisme pada beberapa waktu lalu, secara umum sebenarnya mekanisme musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan lebih disukai untuk dilakukan. Seringkali hal ini tidak cukup bisa menyelesaikan manakala konflik yang terjadi merupakan konflik yang bersifat luas, artinya melibatkan banyak sisi dan banyak komponen yang mengandalkan.

Hasil kajian mengenai kemampuan resolusi konflik ini lebih banyak menyerap modal dan mekanisme yang umum dilakukan warga masyarakat ketika terjadi peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu.

Terjadinya tindakan penjarahan, pembakaran.

Tabel 4. Kemampuan Resolusi Konflik

No.	Indikator	Permasalahan	Hasil Kajian Analisis
1.	Kemampuan masyarakat untuk mencari solusi penyelesaian konflik	- Terjadinya tindakan penjarahan, pembakaran, pengrusakan pada bulan Mei 1998 yang diduga dimotori oleh orang luar daerah Solo. - Situasi trauma dan hubungan yang kurang baik, terutama dengan warga etnis Cina.	Pada umumnya warga membuat pengamanan pagar betis pada lokasi masing-masing beberapa hari pasca kerusuhan, mengintensifkan ronda kampung, patroli KTP melalui forum-forum pertemuan rutin warga sosialisasi keamanan dan ketentraman bersama terus digalakkan.
2.	Kemampuan menyediakan sarana / forum / wadah untuk penyelesaian konflik		
3.	Kemampuan masyarakat untuk menghentikan kerusuhan massal dan menjaga agar kerusuhan massal tidak meluas		

d. Kemampuan Social Recovery

Kemampuan masyarakat untuk melakukan sosial recovery pasca konflik akan membantu proses pemulihan kondisi, terutama secara psikologis akibat wara konflik yang terjadi. Secara umum, kondisi pemulihan pasca konflik dilakukan secara bersama-sama seluruh komponen masyarakat sehingga saling menentramkan. Selain pengaktifan kamtibmas, juga kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat menjadi sarana yang akomodatif bagi penguatan-penguatan moral dan sosial psikologis. Oleh karena itu, indikasi kemampuan sosial recovery yang terdekat adalah melalui pertemuan antar warga untuk saling berempati dan membahas kenyamanan kehidupan bersama dalam suatu forum, wadah ataupun perkumpulan-perkumpulan.

Tabel 5. Kemampuan untuk Social Recovery

Indikator	Permasalahan	Hasil Kajian Analisis
Kemampuan masyarakat untuk menyediakan sarana / wadah / forum rehabilitasi pasca konflik (kerusakan konflik)	Kondisi traumatis dan rasa saling curiga satu sama lain.	Mulai bermunculan LSM ataupun organisasi masyarakat yang menggalang penguatan-penguatan sosial.

Sumber : Data Primer

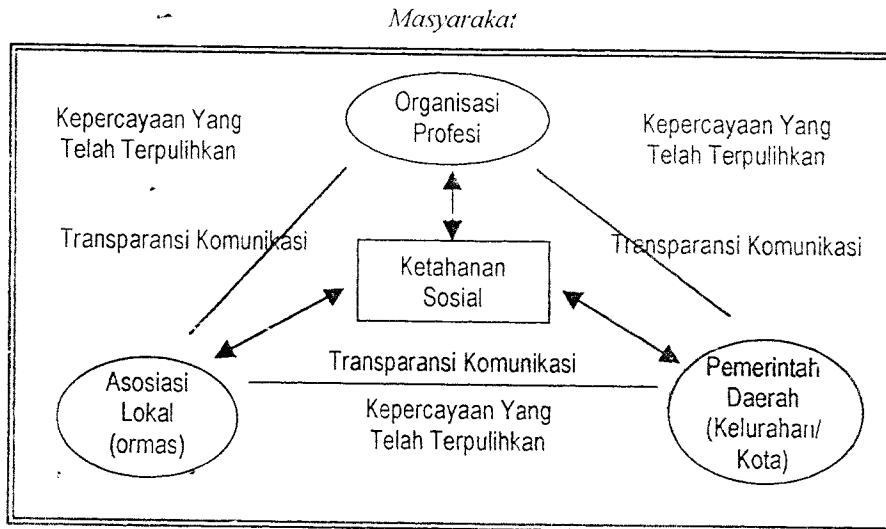
Kemampuan masyarakat untuk melakukan *social recovery* sangat diperlukan untuk mengembalikan keadaan masyarakat pasca kerusuhan ke dalam keadaan damai seperti sediakala. Dalam jangka panjang, *social recovery* ini dilakukan dengan melalui program rekonstruksi sosial sebagai kelanjutan dari program remediasi dan rehabilitasi. Program ini memerlukan landasan fisioner yang baru,

visi dan strategi baru dalam berbagai aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Komponen pembentukan Ketahanan Sosial

Komponen ketahanan sosial meliputi organisasi profesi, asosiasi lokal dan Pemerintah Daerah (kelurahan, Kota). Hubungan antara komponen tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 2. Komponen Ketahanan Sosial



Kontribusi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing komponen dalam mendukung pembentukan ketahanan sosial serta peran dari terbentuknya ketahanan sosial bagi masing-masing komponen tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Organisasi profesi : partisipasi yang ditunjukkan berupa penyediaan sumber daya ekonomi dan penguatan moral masyarakat dapat menjadi potensi pembentuk ketahanan sosial.

- b. Asosiasi lokal : kemampuan asosiasi lokal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam membentuk ketahanan sosial dan ketahanan sosial selanjutnya dapat menjadi kontrol sosial bagi asosiasi lokal tersebut.
- c. Pemerintah daerah (kelurahan, kota) : selaku pihak penyedia pelayanan kepada masyarakat yang dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan, sekaligus sebagai pencipta norma-norma dalam masyarakat.

Uji Coba Model Ketahanan Sosial

Hasil konstruksi model dari penelitian eksplorasi kemudian dilakukan uji coba sinergitas tersebut dalam pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Dalam uji coba model ini didahului dengan evaluasi realisasi program-program tersebut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.

Dalam tahapan aksi ini dibentuk Divisi Ketahanan Sosial yang akan mengikuti perkembangan model ketahanan sosial yang diujicobakan. Sebagai dukungan terhadap upaya ini, Divisi Ketahanan Sosial membentuk inisiator lokal-inisiator lokal yang mewakili komponen-komponen pembentuk ketahanan sosial. Bersama inisiator lokal inilah nantinya diharapkan monitoring dan evaluasi penguatan ketahanan sosial akan dilakukan. Dalam realisasinya, tidak sama penerapan model ketahanan sosial ini di masing-masing wilayah penelitian. Ada yang masih dalam bentuk pendampingan terhadap inisiator lokal untuk mengevaluasi dan mengkaji realisasi implementasi program ketahanan sosial, kendala dan alternatif solusi lanjut yang diinginkan. Tetapi ada pula yang melahirkan sebuah langkah penguatan nilai-nilai ketahanan sosial melalui media informasi dan pembentukan kelompok-kelompok peduli ketahanan sosial (KPKS) di tingkat RW yang diharapkan dapat menjaga dan mendukung kesinambungan ketahanan sosial di tingkat masyarakat.

Sejauh ini uji coba model tersebut masih terus dikembangkan untuk ditemukan secara pasti model yang tepat. Oleh karenanya,

model yang telah dihasilkan sangat memungkinkan dilakukan perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Upaya ini direncanakan setidaknya dalam tiga tahun ke depan untuk lebih mematangkan konstruksi model yang ditemukan. Melalui Divisi Ketahanan Sosial minimal telah terbentuk komunitas peduli ketahanan sosial yang akan terus menggagas dan mengembangkan tema-tema dan mengkaji isu-isu ketahanan sosial terutama di kota Surakarta. Secara kelembagaan, Divisi Ketahanan Sosial ini dikuatkan dengan meletakkan sebagai bagian kajian dari lembaga CIRCUM Surakarta, sebuah lembaga konsultan riset perkotaan dan manajemen komunitas. Lembaga CIRCUM dipilih karena konsentrasi kegiatan di dalamnya yang memegang konsistensi keilmuan dalam penciptaan produk-produk lembaga. Dengan demikian diharapkan pengembangan ketahanan sosial ini benar-benar terjadi sebagai sebuah karya sosial akademis dalam mendukung kondisi sosial aman dan nyaman bagi kota.

D. SIMPULAN

Dari hasil eksplorasi pada awal penelitian dapat diketahui bahwa stakeholders yang ada di Surakarta cukup representatif untuk mendukung terbentuknya sistem ketahanan sosial, mengingat jumlahnya yang banyak dan kapasitasnya yang memadai. Berbagai stakeholders kota seperti legislatif, eksekutif, PT, Perusda, Parpol, instansi vertikal, organisasi profesi, himpunan / paguyuban, unsur budaya, organisasi mahasiswa / pemuda, LSM, unsur agama dan kepercayaan akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan norma-norma dalam masyarakat, selain juga akan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat, sehingga sistem ketahanan sosial dapat terbentuk.

Ketahanan sosial merupakan konsep baru yang semestinya dipahami seluruh elemen masyarakat mengingat peran dan kegunaannya yang penting dalam menjaga situasi kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat, hal ini terkait dengan adanya berbagai konflik yang seringkali berujung pada kerusuhan massal di kota Surakarta. Ketahanan sosial ini meliputi kemampuan untuk menjaga perdamaian, kemampuan

untuk mengantisipasi konflik, kemampuan untuk meresolusi konflik, sekaligus kemampuan untuk mengadakan social recovery.

Kemampuan untuk menjaga situasi damai dapat diukur dari kemampuan untuk mendukung penciptaan kota yang nyaman untuk ditinggali, tidak adanya rasa takut, adanya identitas dan kontrol masyarakat terhadap pembangunan kota, adanya akses masyarakat terhadap imajinasi, dan tersedianya ruang publik dan komunitas.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai ketahanan sosial dapat dihasilkan melalui perencanaan pembangunan di masing-masing kelurahan. Masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan potensi yang dimiliki di kelurahan masing-masing dengan ketahanan sosial sebagai *logical frames* sehingga tidak semata-mata memikirkan solusi dalam jangka pendek bagi permasalahan yang dihadapi, akan tetapi mampu mempertimbangkan aspek-aspek ketahanan sosial. Hal ini selanjutnya menjadi dasar alternatif model penerapan nilai-nilai ketahanan sosial dalam pelaksanaan program yang telah dihasilkan. Pada tahap aksi akan diketahui sejauh mana muatan ketahanan sosial dalam perencanaan mampu diaplikasikan dan menghasilkan target program yang mendukung penguatan ketahanan sosial di masyarakat.

Sejalan dengan target penelitian, maka peneliti selanjutnya melakukan penguatan ketahanan sosial melalui pembentukan sebuah wadah yang concern mengkaji ketahanan sosial. Sebuah lembaga konsultan penelitian perkotaan dan manajemen komunitas menjadi lembaga alternatif yang ditunjuk oleh peneliti dengan membentuk Divisi Ketahanan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Sumampouw & Darmanto Jatman, 1998, *Rampogan Surakarta*, Semarang.
- Agus Dody Sugiartoto, 2003, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Surakarta, Pendekatan Pembangunan Nguwongke-Uwong*, IPGI, Surakarta.
- Drajat Tri Kartono, 1998, *Peran Serta Asosiasi-asosiasi Lokal dalam Mendukung Kemampuan Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Penelitian untuk Pengembangan Model Peran Serta Asosiasi Lokal dalam Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)*, Laporan Penelitian PAU IS UI, Jakarta.
- Drajat Tri Kartono, 2001, *Ketahanan Sosial : Upaya Mengatasi Konflik*, Artikel, Surakarta.
- Drajat Tri Kartono, dkk, 2002, *Kualitas Pemerintahan Kelurahan (Studi Tentang Good Governance, Pelayanan, Kenyamanan Hidup di Wilayah Kelurahan Kota Surakarta)*, Laporan Penelitian : KOMPIP, UCYD, BUILD-UNDP.
- Hanneman Samuel, 1992, *Studi Ujicoba Perangkat Instrumen Pemantauan Kesenjangan Sosial*, Laporan Penelitian, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau Sebutan Lain*, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- Konsorsium LSM (LPPSE, LSIK, LP3ES, Puspa Indah, Care Internasional), 2001, *Program Pemberdayaan Masyarakat*, Lab. Sosio UI, Jakarta.
- Loade Ida, 1999, *Model Penganggulangan Konflik dalam Masyarakat Secara Partisipatif (Studi tentang Konflik Manifest)*, : AI, Jakarta.

- Ma'arif Jammuin, 1999, *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama, Manual Advokasi*, GISCORE, Surakarta.
- Materi Musyawarah Kota Membangun (Muskotbang) Kota Surakarta Tahun 2003, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Surakarta.
- M. Hadi Mulyadi, dkk, 1999, *Runtuhnya Kekuasaan "Kraton Alit" (Studi Radikalisasi Sosial Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta)*, LPTP, Surakarta.
- Nurhadiantomo, 2002, *Malintegrasi Sosial "Pri-Nonpri" (Telaah tentang Manajemennya Konfigurasi Pemilahan sosial "Pri-Nonpri", Kekuasaan Kolektif Kerusuhan Yang Menimpa Kolektivitas Tionghoa dan Implikasinya)*, Laporan Penelitian, Pusat Studi Budaya dan Sosial, Lemlit UMS, Surakarta.
- Onny S. Prijono, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Pembuatan Peta Digital Untuk Sistem Peringatan Dini*, Laporan Akhir, Asisten Deputi Urusan Analisis Perkembangan Kebijakan Publik Kedeputan Bidang Dinamika Masyarakat Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, 2001.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Petunjuk Pelaksanaan*, Konsorsium LSM (LPPSE, LSIK, LP3ES, Puspa Indah, Care Internasional, Bapeda Propinsi, Lab Sosio UI), Jakarta.
- Trisni Utami, 1996, *Usulan Penelitian Hibab Bersaing Perguruan Tinggi, Model Pemberdayaan Gelandangan Melalui Pendidikan Non-Formal*, Surakarta : UNS Surakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Otonomi Daerah*.